

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghafar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kjian Politik dan Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Ed. Pertama, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Kedua, PSH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Adminstrasi Desa dan Kelurahan*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1963-2001)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2010.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Kartasapoetra dkk, *Desa dan daerah dengan Tata Pemerintahnya*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang, 2012.
- Moh. Fadil dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasipatif (Head To A Good Village Governance)*, Ctk. Kedua, UB. Press, Malang, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015.
- _____, *Otonomi Daerah Filosofi, Perkembangannya, dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep Azas dan Aktuaisasinya*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. Ketiga, Ctk. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta
- Soetardjo Kartohadikoesoemoe, *Desa*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sudibyo Triatmojo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Ctk Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta: 1991.
- Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Zairin Harahap, *Materi Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum, UII, 2015.

JURNAL DAN SKRIPSI

Fina Snarita dkk, “Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (SEKDES) Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

M. Farid Ridha “Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS”, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, No. 1, Vol. 11, 2013.

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisas Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, No. 1, Vol. 1, 2013.

Lilik Kurniawan, *Kajian Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa dari Non PNS Menjadi PNS di Kabupaten Grobogan Menurut PP. Nomor 45 Tahun 2007*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Muhammad Fachrudin, *Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DATA ELEKTRONIK

<http://www.radarbanyumas.co.id/64-desa-tanpa-sekdes>, 7 November 2015, 20.30.